

Hikmah Ramadhan 1437H

Halal-Haram Dalam Pengelolaan Agraria

pintu dosa dan kemudharatan serta kesengsaraan.

Bulan Ramadhan 1437 hijriyah ini, di mana di setiap kesempatan kita semua lahap untuk mengamalkkan nashihat-nashihat Allah menjadi sangat penting bicara halal haram dalam pengelolaan pertanian. Setidaknya ada dua alasan persoalan haram halal tanah dibicarakan. Pertama, krisis pangan di sementara daerah atau negara lain atau di masa ke depan sebagai akibat tanah dikelola dengan cara yang jauh dari tuntutan hukum agama. Kedua, nilai asset masyarakat sedunia, 70% dari total asset berupa tanah untuk negara berkembang termasuk kita, 60 % untuk negara maju.

Sementara masyarakat masih awam mengenai halal-haram asset dari hasil atau yang berupa tanah tersebut. Menjadi sangat penting bicara mengenai halal haram di bidang pertanian sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat dapat tercapai, sebaliknya kemudharatan dan kesengsaraan diri dan masyarakat dapat dihindari. Islam membenci orang berspekulasi dengan tanah, ditunggu harga sampai mahal, sementara tanahnya telantar,

Sunarno, S.H., M.Hum.
Dosen Senior Hukum Agraria, UMY
Candidat Doktor bidang Agraria, IIUM



tidak ditanami, tidak digarap, dan kepada saudaranya untuk digarap, atau tinggakannya (HR Ahmad dan Muslim).

Kedua, kalau tidak mampu menggarap sendiri, meminjamjamkan kepada saudaranya atau orang lain yang lebih mampu tanpa mengambil uang sewa berupa dirham atau dinar. Ini juga menunjukkan bahwa prinsip produktivitas dan non-eksplorasi dalam pertanian adalah nilai kehalalan yang paling absolut.

Ketiga, dilakukan dengan muzara'ah yaitu bekerja sama antara si pemilik dan musqot atau mukhaharoh bersyarat, dan penggarap dengan porsi yang disepakati menyediakan bibit, alat, pupuk atau fasilitas operasional lainnya dengan porsi yang telah sepakati, para pihak bekerja sama melakukan produktivitas tanah dan melakukannya secara adil dengan lose and profit sharing.

Mengaca pada prinsip-prinsip pengelolaan tanah islam tadi, kita dapat melihat dalam masyarakat kita. Betapa banyak berbagai jenis perjanjian agraria: tambang, hutan, perikanan, pertanian, perkebunan di negara ini yang patut ditanyakan kehalalannya. Atau setidinya tercampur dengan yang haram. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Halal haram pada masalah aset terbesar ini diarahkan agar Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa benar-benar dapat dipegakkan.

Secara personal, korporat, atau negara saat ini banyak melakukan perjanjian perminjaman di sektor tambang, perkebunan, perikanan, pertanian yang melanggar prinsip-prinsip produktivitas dan keadilan.

Sekian tahun dan sekian kali pembaharuan kontrak-kontrak tambang

dan lainnya yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip produktivitas dan keadilan -anti-

eksplorasi, yang akhirnya terjebak kepada triliunan rupiah aset yang

tidak jelas halal-haramnya, akhirnya

masuk dalam lubang kesengsaraan bangsa dan masyarakat.

Terasa sekalik rekayaan alam bangsa

yang sangat besar ini justru tidak

segera memberikan keberkahan bagi

bangsa ini. Boleh jadi ini menjadi isyarat sangat penting untuk kita.

Kita harus kembali kepada hukum-

hukum yang memang sudah dibuat oleh Allah yang memiliki semua

aspek agraria ini. Wallahu'a'lam.